

Di Indonesia, istilah kewirausahaan sosial pertama kali diperkenalkan oleh Ashoka Indonesia pada tahun 1983 (Idris & Hati, 2013). Ashoka Indonesia merupakan sebuah organisasi Internasional yang berfokus pada upaya peningkatan sektor kewirausahaan sosial. Pada dasarnya, kewirausahaan sosial merupakan hasil pengembangan dari konsep kewirausahaan yang berada pada ranah ilmu ekonomi. Namun yang membedakannya ialah bahwa kewirausahaan dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, sedangkan kewirausahaan sosial memasukkan unsur kepedulian atau misi sosial di dalam perolehan keuntungan tersebut. Sederhananya, orang atau sekelompok orang yang menjalankan kewirausahaan sosial, ia atau mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja, melainkan juga berorientasi pada tujuan sosial yang ada.

Lebih lanjut lagi, kewirausahaan sosial juga muncul karena beberapa alasan (Yunus, 2007; Jiao, 2011), antara lain: *Pertama*, ketidakmampuan Negara di dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial oleh karena kebijakan-kebijakannya yang kurang efektif; *Kedua*, kondisi keuangan dari entitas bisnis yang tidak memungkinkan untuk membiayai aktifitas sosialnya; *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta yang masih belum memberikan manfaat yang signifikan untuk membantu proses terjadinya perubahan sosial di masyarakat; *Keempat*, kurangnya kepekaan masyarakat di dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada, serta ketidakmampuannya di dalam memanfaatkan potensi dan peluang usaha di sekitar mereka. Tidak hanya itu, kewirausahaan sosial juga muncul dengan didorong oleh dua faktor, yakni faktor dari sisi penawaran dan sisi permintaan (Nicholls, 2006).

Dari sisi permintaan, kewirausahaan sosial muncul sebagai jawaban atas ketidakmerataan ekonomi. Alih-alih membangun ekonomi secara berkelanjutan, semakin ketatnya kontestasi persaingan pasar bebas justru disinyalir telah memunculkan ketidakmerataan ekonomi bagi masyarakat. Padahal, pasar bebas itu sendiri sejatinya telah memberikan peluang besar bagi munculnya entitas bisnis yang baru. Oleh sebab itu kewirausahaan sosial lahir sebagai upaya untuk mengatasi dampak pembangunan ekonomi yang tidak merata dengan cara memanfaatkan peluang pasar bebas yang ada. Pada sisi lain, pemerintah yang sedianya memberikan berbagai bentuk pelayanan publik juga justru terkendala pada persoalan inefisiensi. Sehingga dengan kondisi ini tentunya dapat mendorong pada semakin pentingnya peran dari kewirausahaan sosial sebagai suatu entitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, namun juga menjalankan misi sosialnya pada waktu yang bersamaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-ESCAP) dan British Council pada tahun 2018, kewirausahaan sosial di

Indonesia dapat menjadi sarana pokok di dalam membangun sektor ekonomi kreatif dan inklusif. Hal ini terbukti dari sekitar 340.000 wirausaha sosial yang ada di Indonesia, sektor yang paling diminati ialah sektor industri kreatif dengan persentase 22% dari total keseluruhan (British Council, 2018).

Masih dalam sumber yang sama, kewirausahaan sosial di Indonesia juga telah memberikan jalan bagi sektor ekonomi yang inklusif –yang mengatasi permasalahan sosial–, di mana bentuk usahanya berdasarkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi mereka yang merupakan penyandang difabilitas, perempuan berpendidikan rendah, dan penduduk setempat yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Hal ini menjadi mungkin karena kewirausahaan sosial dapat menyerap tenaga kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dalam berwirausaha. Pun pemanfaatan teknologi digital dalam berwirausaha yang semakin menghasilkan lebih banyak pengusaha sosial milenial dengan beragam ide usaha yang modern.

Tidak hanya itu, kewirausahaan sosial juga telah berkontribusi di dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebanyak 1,9 persen (British Council, 2018). Meskipun kontribusi tersebut dapat dikatakan masih minim, namun keberadaan sektor kewirausahaan sosial mampu menghadirkan sarana-sarana ekonomi kreatif dan inklusif. Sehingga dapat menjadikannya mandiri secara finansial untuk mendukung proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Ke depannya, dapat diproyeksikan bahwa jumlah pengusaha sosial milenial di Indonesia akan semakin meningkat dan berlandaskan pada ide-ide *brilliant* untuk mengentaskan permasalahan sosial –bahkan lingkungan–, mengingat pemerintah juga sangat mendukung sektor ini dengan cara mempermudah akses izin berusaha.